

ANALISIS PENDIDIKAN SEBAGAI URUSAN PRIORITAS DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG

¹Muhammad Taufiq, ²Ria Fitriani, ³Durratun Nashihah

Senior Researcher at SmartID Indonesia, Malang, East Java Indonesia

E-mail: durratunn12@gmail.com

Abstrak: Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, berkarakter, dan berdaya saing global. Terlepas dari nilai IPM Kota Malang yang tinggi, Kota Malang masih belum dapat terbebas dari sejumlah permasalahan dalam bidang pendidikan. Permasalahan yang beragam, mulai dari belum meratanya kesempatan dan partisipasi belajar, belum maksimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, hingga kurangnya jumlah tenaga pendidik untuk kaum disabilitas menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan. Atas dasar tersebut, pendidikan menjadi salah satu urusan wajib yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah di Kota Malang sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini bermaksud menganalisis pendidikan sebagai prioritas pembangunan di Kota Malang yang ditinjau berdasarkan sudut pandang praktis, teoritis, dan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data *literature*, *document*, dan *legal review* untuk mengkaji dan menganalisis pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Malang masih menemui sejumlah permasalahan dan oleh karena itu penetapan pendidikan sebagai urusan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang sudah tepat dan sejalan dengan konstitusi serta RPJMN maupun RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang.

Kata kunci: Pendidikan, Prioritas Pembangunan, RKPD

Abstract: *The implementation of education is a necessity in order to build human resources who are educated, have character, and are globally competitive. Apart from the high HDI value, Malang City still cannot be free from a number of problems in the field of education. Various problems, ranging from the unequal distribution of learning opportunities and participation, the lack of maximum quality and quantity of teaching staff, the lack of educational facilities and infrastructure, to the lack of educators for people with disabilities become a separate homework for the Malang City Government, especially the Education Office. On this basis, education is one of the obligatory matters that are set as a priority for regional development in Malang City in accordance with the constitutional mandate. This study intends to analyze education as a development priority in Malang City which is reviewed from a practical, theoretical, and normative point of view. This study uses a qualitative descriptive approach with data analysis techniques of literature, document, and legal review to examine and analyze education as a priority for regional development in Malang City. The results of the study indicate that the implementation of quality education in Malang City is still facing a number of problems and therefore the determination of education as a priority matter in the Local Government Work Plan (RKPD) of Malang City is appropriate and in line with the constitution and the RPJMN and RPJMD of East Java Province and Malang City.*

Keywords: *education, development priorities, RKPD*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan yang dapat menjadi pemicu berkembangnya pembangunan bidang lainnya. Banyak aspek yang perlu ditata dalam pembangunan pendidikan, mulai dari kebijakan pendidikan sampai dengan

praktik pembelajaran dalam satuan pendidikan. Kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan yang baik merupakan suatu keniscayaan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem pendidikan di Indonesia dibentuk untuk memfasilitasi masyarakatnya dengan pencapaian

pendidikan yang baik yang selaras dengan kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia (Bucciarelli, 2013).

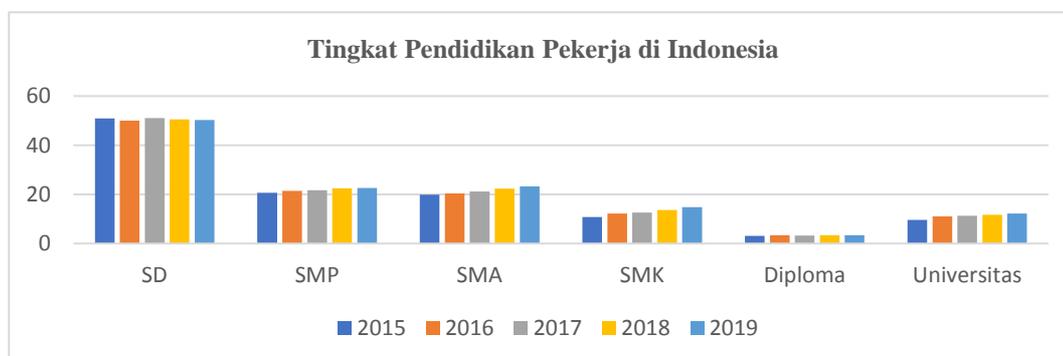
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa fungsi dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membangun karakter bangsa (Tiara dkk., 2020).

Sayangnya, kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih belum maksimal. Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya, kualitas pendidikan di Indonesia terbilang masih relatif rendah (Sebayang & Swaramarinda, 2020). Selaras dengan itu, Sudarman dkk., (2016) juga menyatakan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini kualitasnya yang masih rendah. Studi lain menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan di bidang pendidikan antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil di Indonesia, terutama Jawa dan luar Jawa. Permasalahan ini tentunya membutuhkan perhatian lebih, sebab dapat menjadi penghambat upaya pemerintah dalam mencapai tujuan

pembangunan nasional. Terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19, permasalahan dalam pendidikan semakin kompleks. Selama pandemi, bukan hanya siswa yang dihadapkan dengan sejumlah kesulitan dalam belajar namun juga para tenaga pendidik (Zajic dkk., 2022).

Dewasa ini, pendidikan difokuskan untuk meningkatkan metode pembelajaran reflektif guna mendukung dan menerapkan model serta contoh yang baik dalam metode pengajaran (Shin, 2021). Selain itu, era persaingan global turut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan sejumlah tantangan persaingan global dan perlu memetakan permasalahan dalam mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik di masa depan (Karim, 2021). Kualitas pendidikan akan berdampak pada kualitas SDM yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas masyarakat khususnya yang bekerja di sektor industri. Lebih jauh, hal ini akan berdampak terhadap daya saing ekonomi di tingkat global. Berikut adalah gambaran tingkat pendidikan pekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015 hingga 2019.



Gambar 1. Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia 2015-2019

Sumber: BPS (2020)

Pembangunan sebuah negara tidak bisa dilepas dari pembangunan sumber daya manusianya. Hubungan keterkaitan ini akan begitu terlihat pada hubungan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam teori ekonomi disebutkan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan *human capital* yang berkualitas, maka akan mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi yang semakin membaik akan memberikan imbal balik kepada masyarakat atas kreativitas dan produktivitasnya melalui pendapatan rumah tangganya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu tantangan dalam sektor industri adalah kenaikan upah tenaga kerja yang masih belum diimbangi dengan peningkatan produktivitas yang setara. Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah. Tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah yaitu sebanyak 50,2 juta orang (39,7 persen). Sementara, tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Ketidakselarasan antara keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi tantangan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Ada kebutuhan mendesak untuk keterampilan perencanaan pendidikan yang baik di masyarakat. Memiliki keterampilan perencanaan pendidikan yang baik diharapkan dapat mengurangi kemungkinan masalah serius. Negara-negara berkembang yang menerapkan otonomi dalam pendidikan, otonomi cenderung menimbulkan masalah: konflik kepentingan antara pemerintah

pusat dan daerah, kualitas pendidikan yang buruk, tata kelola yang buruk, manajemen pendidikan yang tidak efektif, ketimpangan pemerataan pendidikan, keterbatasan mobilitas dan ruang gerak. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan mengurangi persyaratan akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas masyarakat untuk pendidikan.

Upaya peningkatan mutu dan pembangunan sektor pendidikan di era otonomi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Provinsi, tetapi juga tanggung jawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu dan pembangunan bidang pendidikan menjadi isu strategis setiap pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pembenahan sekolah dan administrasi pendidikan. Untuk itu dikembangkan dan dilaksanakan kebijakan desentralisasi pengelolaan pendidikan dan otonomi sekolah. Kebijakan desentralisasi pendidikan ini sejalan dengan desentralisasi pengelolaan oleh pemerintah, sehingga semakin banyak Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengelola pusat daerahnya (otonom). Kebijakan desentralisasi pengelolaan pendidikan dan otonomi pendidikan dasar dan menengah dirumuskan dalam Kebijakan Manajemen Sekolah (MBS).

Menurut Minarni (2011) dalam Febrianto dan Sulaiman (2014), Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah “pemberian otonom yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua *stakeholdernya*, sekolah pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan dengan sifat otonomistiknya tersebut akan menjadi

suatu institusi pendidikan yang organik, demokratis, kreatif, dan inovatif serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaruan sendiri”.

Kota Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Meskipun demikian, salah satu komponen penyusun IPM yaitu rata-rata lama sekolah sampai dengan tahun 2020 hanya mencapai 10,18 tahun (BPS Kota Malang, 2021). Artinya, masyarakat Kota Malang secara rata-rata menempuh pendidikan selama 10,18 tahun. Padahal, pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun yang dengan kata lain tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga dihadapkan dengan sejumlah permasalahan lain di bidang pendidikan. Permasalahan tersebut beragam, mulai dari belum meratanya kesempatan dan partisipasi belajar, belum maksimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, hingga kurangnya jumlah tenaga pendidik untuk kaum disabilitas. Rentetan permasalahan ini menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Kota Malang untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakatnya.

Dengan mengusung isu strategis peningkatan kualitas SDM yang terdidik dan berkarakter, mau tidak mau Pemerintah Kota Malang harus memposisikan pendidikan sebagai ujung tombak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu urusan wajib yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah di Kota Malang sesuai dengan amanat konstitusi. Untuk itu, penelitian ini bermaksud menganalisis pendidikan sebagai prioritas pembangunan di Kota Malang yang ditinjau berdasarkan sudut pandang praktis, teoritis, dan normatif. Dengan demikian, hasil dari penelitian

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan, baik secara praktis maupun teoritis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan berfokus pada penetapan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah di Kota Malang. Menurut Madekhan, (2018), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Deskriptif secara karakteristik bermaksud membantu para peneliti untuk menggambarkan atau mempertajam penjelasan penelitian agar didapatkan koneksitas antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian (Ingrit, 2020).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic literature review* (SLR), *document review* serta *legal review*. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber mulai dari literatur (jurnal nasional dan internasional), dokumen pemerintah (RKPD, RPJMD, dan RPJMN), dan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif (*Systematic Literature Review*, *document review*, dan *legal review*) dan hasilnya dapat digunakan untuk mengkaji pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah di Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan menjadi salah satu isu prioritas pembangunan bukan tanpa sebab. Terdapat beberapa alasan dan sejarah yang melatarbelakangi hal ini. Pertama, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat bangsa yang penyelenggaraannya tidak dapat

ditanggihkan. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa akan sulit untuk membangun peradaban dan mencapai tujuan pembangunan. Studi menunjukkan bahwa pendidikan membawa sejumlah benefit dalam kehidupan. Misalnya dalam hal kesehatan, pendidikan dapat mendorong kualitas kesehatan masyarakat melalui pengambilan keputusan yang lebih berwawasan kesehatan atau pengetahuan terkait sistem kesehatan (Grossman, 2005). Studi lain menunjukkan bahwa pendidikan terbukti memberikan dampak positif dalam hal penurunan angka kriminalitas dan peningkatan angka partisipasi politik (Dee, 2004; Lochner & Moretti, 2004).

Selain itu, pendidikan mutlak diselenggarakan sebab telah bagian yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selaras dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menyatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang baik dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan ketetapan MPRS Nomor 2 Tahun 1960 menyebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang memiliki rasa dari nilai Pancasila sejati. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kita gunakan sebagai acuan penyelenggaraan sistem pendidikan saat ini menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis.

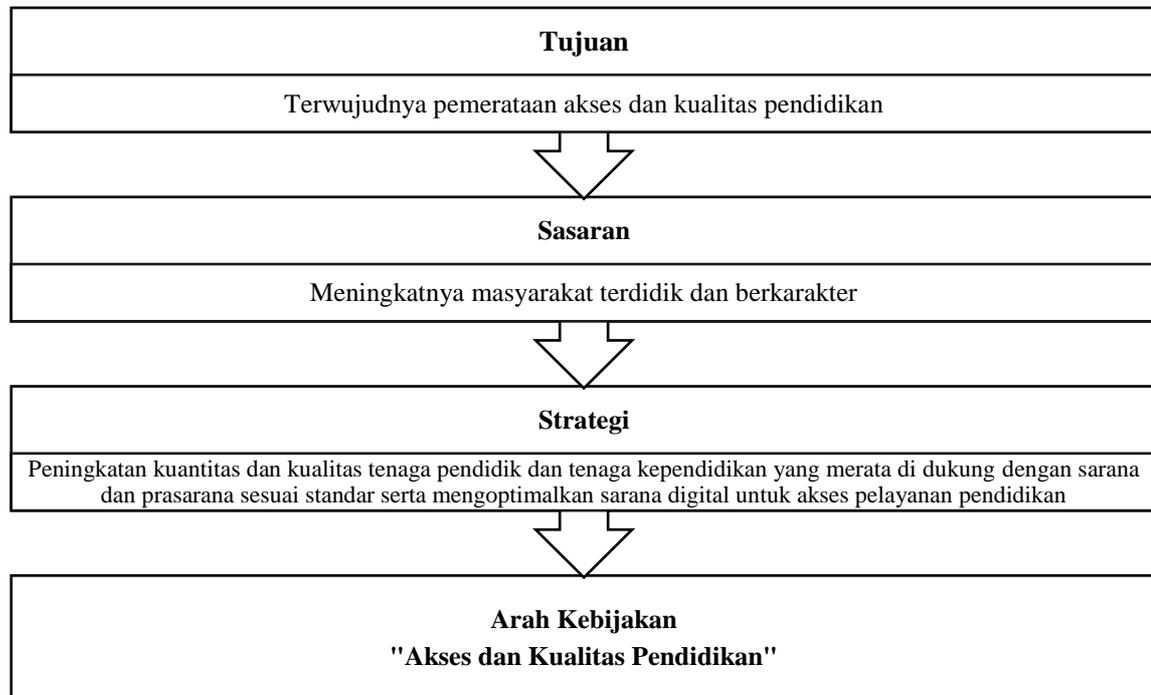
Pendidikan menjadi ujung tombak dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan mampu berdaya saing global. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi isu utama prioritas pembangunan nasional yang kemudian diturunkan ke daerah sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Terlepas dari sejarah panjang isu pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional, pemerintah pusat dan daerah termasuk Kota Malang hingga saat ini masih belum dapat mewujudkan sistem dan kualitas pendidikan secara maksimal. Studi menunjukkan bahwa terlepas dari upaya yang telah pemerintah lakukan, kualitas pendidikan di Indonesia terbilang masih relatif rendah (Sebayang & Swamarinda, 2020; Sudarman dkk., 2016). Untuk itu, pemerintah perlu untuk memaksimalkan upaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Identifikasi permasalahan pendidikan di Kota Malang

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023, ditetapkan visi pembangunan Kota Malang yaitu “Kota Malang Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi ini, rumuskanlah empat misi yang salah satu di antaranya berbunyi “Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.” Visi ini merupakan visi pertama yang menandakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya menjadi prioritas pembangunan.

Pendidikan menjadi hal pertama dan utama yang disebutkan dalam misi pembangunan Kota Malang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan sehingga penyelenggaraannya tidak dapat

dinomorduakan. Berikut merupakan ilustrasi penjabaran tujuan dan sasaran ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan misi 1 (khusus bidang pendidikan).



Gambar 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 Bidang Pendidikan

Sumber: RPJMD Kota Malang 2018-2023

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Malang telah secara runtut menjabarkan visi dan misi pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan baik dan sistematis. Hal ini dapat menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Malang secara tepat.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah Kota Malang salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera. Untuk mencapai ini, Kota Malang telah memiliki modal

potensial berupa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu 82,00 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kota Malang tahun 2022. Nilai ini dapat dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan target nasional yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu sebesar 73,48.

Hal ini mengisyaratkan bahwa komponen penilaian dalam IPM yang salah satunya adalah pendidikan telah memenuhi target. Namun, Kota Malang sejatinya masih belum dapat terlepas dengan sejumlah permasalahan dalam bidang pendidikan. Responden menyatakan bahwa, "Kota Malang merupakan kota pendidikan, namun masih terdapat permasalahan yang belum bisa diselesaikan, salah satunya

angka putus sekolah yang masih lumayan tinggi”. Pernyataan responden tersebut sejalan dengan pernyataan responden lain yaitu, “Banyaknya angka putus sekolah di Kota Malang ini salah satunya adalah karena anak tersebut ingin membantu orang tua dengan bekerja”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun IPM dikatakan cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang seharusnya bisa diatasi untuk kedepannya.

Hal ini selaras dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan RPJMD Kota Malang sampai tahun berjalan yang menunjukkan belum tercapainya sasaran program pendidikan secara 100%. Ini juga disebutkan dalam permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Dua diantaranya menyinggung tentang isu pendidikan, yaitu perlunya upaya peningkatan SDM terdidik, berkarakter dan berbudaya dalam menghadapi era digital serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di seluruh wilayah.

Secara lebih rinci, permasalahan tersebut diidentifikasi dalam RKPD Kota Malang sebagai berikut: 1) belum maksimalnya kesempatan belajar, partisipasi dan keberlanjutan pendidikan; 2) belum dilakukannya pemetaan dan pemerataan guru; 3) masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 4) belum meratanya akses pendidikan; 5) masih terdapat siswa yang melanjutkan ke pondok pesantren maupun melanjutkan ke paket A dan/atau B tanpa pemberitahuan; 6) belum optimalnya digitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah; 7)

kurangnya jumlah tenaga pendidik untuk kaum disabilitas; 8) penambahan dan perbaikan sekolah inklusif bagi penyandang disabilitas, dan; 9) perlunya peningkatan kualitas sekolah dengan sarana daring di tengah situasi pandemi Covid-19 (RKPD Kota Malang, 2022).

Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia sekolah di Kota Malang menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya partisipasi pendidikan anak usia tertentu pada jenjang pendidikan yang sesuai. Perkembangan APK Kota Malang dari tahun 2015-2020 disajikan dalam tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa APK PAUD, SD sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara itu, APK SMP mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 meskipun masih belum mencapai angka maksimal. APK dengan penurunan terbanyak yaitu APK PAUD yang turun hingga 30%. Hal ini berkaitan dengan situasi pandemi yang menyebabkan orang tua anak usia dini enggan untuk mulai memperkenalkan anaknya dengan dunia pendidikan di luar rumah. Selain APK yang mengalami penurunan, hal lain yang turut menjadi permasalahan adalah turunnya kualitas fasilitas pendidikan yang cukup drastis di Kota Malang pada tahun 2020. Fasilitas yang dimaksud disini adalah kondisi bangunan sekolah dasar maupun menengah. Padahal, fasilitas pendidikan sekolah dasar dan menengah di Kota Malang selalu mengalami perbaikan dari tahun 2015 hingga 2019. Berikut adalah Tabel 2 yang menunjukkan perkembangan fasilitas bangunan sekolah di Kota Malang dari tahun 2015-2020

Tabel 1. APK Kota Malang Tahun 2015-2020 (dalam persen)

APK	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD	84,28	84,28	86,09	86,09	86,09	56,49
APK SD sederajat	95,99	95,86	105,89	102,59	104,04	100,9
APK SMP sederajat	76,83	85,13	100,22	91,70	92,40	99,34
APK SMA sederajat	117,39	84,67	103,035	106,59	110,15	98,34

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang (2021)

Tabel 2. Kondisi Fasilitas Bangunan Pendidikan Kota Malang Tahun 2015-2020 (dalam persen)

Kondisi Bangunan baik	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD sederajat	86,29	87,92	88,92	103,53	112,66	63,23
SMP sederajat	91,85	92,93	93,83	104,77	111,53	70,38
SMA sederajat	93,35	94,83	95,83	114,135	125,28	N.A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang (2021)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa kondisi bangunan baik dari jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah selalu mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan terutama pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat. Angka yang diperoleh pada tahun 2020 ini bahkan lebih rendah dari tahun 2015. Dengan kata lain, ini merupakan suatu kemunduran besar jika bahkan jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.

Meskipun pada tahun 2020 terjadi gelombang pandemi Covid-19, namun tidak semestinya hal ini menurunkan kualitas bangunan pendidikan. Hal ini karena pandemi lebih berdampak pada sistem dan metode pembelajaran serta fasilitas pendidikan selain bangunan sekolah. Untuk itu pemerintah perlu meninjau kembali apa yang menjadi penyebab turunnya jumlah bangunan sekolah dengan kondisi baik yang terjadi secara signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Strategi Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan

Pemerintah Kota Malang telah memiliki rencana kerja dan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan

sebagai salah satu urusan wajib daerah. Terdapat setidaknya tiga program yang telah disiapkan pemerintah terkait urusan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kota Malang Tahun 2022. Ketiga program tersebut antara lain: 1) program pengelolaan pendidikan; 2) program mengembangkan kurikulum, dan; 3) program pendidik dan tenaga kependidikan.

Guna mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Malang telah menetapkan pagu indikatif untuk masing-masing program. Berikut adalah Tabel 3 yang menunjukkan pagu indikatif Pemerintah Kota Malang untuk urusan pendidikan di tahun 2022.

Selain ketiga program tersebut, pemerintah Kota Malang juga menyiapkan sejumlah program lain dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter. Program-program tersebut terkait dengan indeks pendidikan, di antaranya: 1) program pengembangan kebudayaan; 2) program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya; 3) program pengelolaan permuseuman; 4) program pembinaan sejarah; 5) program pengembangan kesenian tradisional; 6) program pembinaan kepramukaan; 7) program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; 8) program pengembangan

kapasitas daya saing kepemudaan, dan; 9) program pengembangan kapasitas kepramukaan.

Terkait dengan infrastruktur pendidikan, Pemerintah Kota Malang

dalam rencana kerjanya telah mencanangkan berbagai kegiatan perbaikan dan/atau penambahan fasilitas pendidikan.

Tabel 3. Pagu Indikatif Urusan Pendidikan di Kota Malang Tahun 2022 dan 2023

Program	Pagu Indikatif	
	2022	2023
Program pengelolaan pendidikan	Rp. 80.191.091.967,00	Rp. 140.500.088.600,00
Program pengembangan kurikulum	Rp. 100.000.00,00	Rp. 175.000.000,00
Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rp. 393.785.000,00	Rp. 150.000.000,00

Sumber: RKPD Kota Malang (2022)

Beberapa di antaranya yaitu: 1) penambahan ruang kelas baru; 2) rehabilitasi sedang/berat ruang kelas di 80 sekolah; 3) rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah; 4) pengadaan mebel sekolah; 5) pengadaan perlengkapan sekolah; 6) pengadaan kelengkapan siswa, dan; 7) pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah. Selain itu, terdapat pula kegiatan untuk meningkatkan kapasitas peserta didik, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah antara lain: 1) penyediaan biaya personil peserta didik; 2) penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik; 3) pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa; 4) pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan; 5) pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, dan; 6) peningkatan kapasitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

Terkait pengembangan kurikulum, pemerintah Kota Malang mencanangkan kegiatan penetapan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Nonformal. Sedangkan untuk program pendidik dan tenaga kependidikan telah dicanangkan kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan/Nonformal.

Melihat semua program dan didukung dengan pendanaan yang ada menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathony dan Prianty (2019) yang menyatakan bahwa dengan adanya anggaran dana yang sesuai, maka kualitas pendidikan sekolah akan meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, Tamam (2018) juga menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kerja sama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyediakan sistem pendanaan pendidikan yang optimal. Dengan demikian, upaya dalam merealisasikan program pemerintah terkait dengan pendidikan serta pendanaan yang sesuai diharapkan dapat digunakan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Sehingga sasaran meningkatnya masyarakat yang terdidik dan berkarakter dapat tercapai secara maksimal. Lebih lanjut, upaya ini diharapkan dapat melahirkan SDM yang berkualitas serta siap bersaing di tengah persaingan global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagai prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan APK serta kualitas fasilitas pendidikan Kota Malang yang mengalami penurunan. Selain itu, sejumlah permasalahan yang menjadi kendala terwujudnya pendidikan yang berkualitas dari segi pemerataan, akses, kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan, serta ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Dengan banyaknya program kerja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang untuk kedepannya.

SARAN

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia patut menjadi bahan pertimbangan bersama. Sebab, dengan melihat Kota Malang yang berpredikat IPM “sangat tinggi” masih tidak luput dari banyaknya permasalahan dalam bidang pendidikan sebagai salah satu basis penyusun IPM. Ini membawa kita pada pertanyaan mengenai seperti apa kondisi pendidikan di wilayah lain dengan IPM lebih rendah dan di Indonesia secara umum. Untuk itu, sudah sangat tepat jika pendidikan adalah urusan wajib dan prioritas pembangunan yang mutlak diselenggarakan demi mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik dan berkarakter sesuai dengan isu strategis Kota Malang serta sejalan dengan konstitusi Negara Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah Kota Malang. Penelitian selanjutnya dapat mengambil fokus pada aspek lain yang juga

menjadi urusan prioritas pembangunan daerah, misalnya kesehatan. Dalam tataran praktis, pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pendidikan perlu untuk meningkatkan upaya dan inovasi yang berguna untuk mendorong perbaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang. Selain itu, Kota Malang memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan mutu pendidikan sebab kota ini memiliki begitu banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Hal ini dapat menjadi peluang kemajuan yang besar bagi masyarakat sebab perguruan tinggi wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Melalui pengabdian ini, baik mahasiswa maupun dosen dapat mengabdikan ilmunya kepada masyarakat, membawa pendidikan lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, Komunitas sebagai salah satu unsur masyarakat juga dapat memainkan perannya dalam menghadirkan sekolah non-formal bagi masyarakat. Stakeholder lain juga harus dipastikan turut berkontribusi untuk dunia pendidikan, seperti korporasi melalui *corporate social responsibility* (CSR). Dengan kata lain, gotong royong untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting sebab terwujudnya masyarakat yang terdidik dan berkarakter merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah namun juga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kota Malang dalam Angka*.
- Bucciarelli, A. (2013). Standardized Chaos: A Portrait of the Indonesian Education System. *SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad*. <http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=25>

- 56&context=ispcollection.
- Dee, T. (2004). Are There Civic Returns to Education? *Journal of Public Economics*, 8(9–10), 1697–1720.
- Fathony, A. A., & Prianty, F. (2019). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Penggunaan Anggaran Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 1–12.
- Febrianto, P. T., & Sulaiman, S. (2014). Kajian Strategis dan Prioritas Pembangunan Pendidikan Menengah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pulau Madura. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(4), 211–220.
- Grossman, M. (2005). Education and Nonmarket Outcomes. *National Bureau of Economic Research (August)*.
- Ingrit, B. L. (2020). Literature Review: Perception And Quality Of Women's Life With Infertility. *Nursing Current Jurnal Keperawatan*, 7(2).
- Karim, S. A. (2021). Mapping the Problems of Indonesia's Education System: Lessons Learned from Finland. *Tell : Teaching of English Language and Literature Journal*, 9(2), 86. <https://doi.org/10.30651/tell.v9i2.9368>
- Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
- Lochner, L., & Moretti, E. (2004). The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports. *American Economic Review*, 94(1), 155–189.
- Madekhan, M. (2018). Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif. 2018, 7(2), 62–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.30733/7336/rfma.v7i2.78>
- Osmanović, Z. J., Maksimović, J., & Milanović, N. M. (2022). Personal And Professional Empowerment Of Reflective Practitioner Teachers During The Covid 19 Pandemic. *Problems of Education in the 21st Century*, 80(2), 371–385. <https://doi.org/10.33225/pec/22.80.371>
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022.
- Sebayang, K. D. A., & Swaramarinda, D. R. (2020). Educational policy implementation in Indonesia: The art of decision making. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 1286–1290.
- Shin, J. (2021). Preservice music teachers in Korea and their collaborative reflection with peers. *International Journal of Music Education*, 39(4), 371–382. <https://doi.org/10.1177/0255761420986237>
- Sudarman, E., Sawitri, N. N., & Budiono, G. L. (2016). Development of Education in Indonesia: an Effort To Strengthening Innovation Systems and International Competitiveness. *Vector European Revista Științifică*, 3(1), 14–20.
- Tamam, B. (2018). Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 29(2), 35–48.
- Tiara, O. E., . I., & Sholikah, M. (2020). How Do School Facilities Affect School Quality? Case Study in Vocational High School at Pati, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2020(19), 865–881. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6648>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan
Nasional.